

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG KONDENA  
DISTRIK KOLAWAK KABUPATEN LANNY JAYA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik  
Guna mencapai gelar sarjana S.AP pada  
Program Studi Administrasi Publik*



Disusun oleh,

**YULINCE KOGOYA**  
**NIM. 2017 – 11 – 110**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM) YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG KONDENA**  
**DISTRIK KOLAWAK KABUPATEN LANNY JAYA**

Identitas Penulis,

NAMA : YULINCE KOGOYA

NIM : 2017-11-110

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK (S1)

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal : 07 Spetember 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**H.MUHAMMAD ALI,S.Sos.,M.Si**  
NIDN. 1417056701

**NUR AINI,S.Sos,M.AP**  
NIDN.1422127401

Mengetahui :

Ketua Program Studi

**IRMAYANI MISRAH ,S.Sos, M.AP**  
NIDN. 1409108402

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG KONDENA**  
**DISTRIK KOLAWAK KABUPATEN LANNY JAYA**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi

Pada hari Jumat tanggal 14 September 2022

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

**H.MUHAMMAD ALI,S.Sos.M.Si**  
**NIDN.1417056701**

**NUR AINI,S.Sos.M.AP**  
**NIDN. 1422127401**

Anggota

Anggota

**GIRINIUS WENDA,S.Sos.,M.Si**  
**NIDN. 1412108801**

**HASRIANI MUSLIM,S.Pd.,M.Pd**  
**NIDN. 1409128201**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra.TELLY NANCY SILOOY.,M.Si**  
**NIDN. 1207086701**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2. Ibu Dra.Telly Nancy Silooy,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
3. Ibu Irmayani Misrah,S.Sos.,M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak H.Muhammad Ali,S.Sos.,M.Si dan ibu Nur Aini,S.Sos.,M.AP selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
6. Kepala Kampung Kondena Kenus Kogoya yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
7. Orangtuaku tersayang, ayah Yusuf Kogoya dan Ibu Lea Wenda yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Angkatan 2017/2018 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Maret 2022

Penulis,

**JULINCE KOGOYA**  
**NIM. 2017-11-110**

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian analisis .....	8
2. Pengertian pengalokasian dana kampung .....	9
3. Pengelolaan dana kampung .....	9
4. Pengertian desa/kampung .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Definisi Operasional.....	30
D. Kerangka Konseptual Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian .....	33
C. Populasi .....	33
D. Instrumen Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Keadaan Lokasi penelitian.....	31
2. Keadaan responden .....	41
3. Analisa data.....	44

B. Pembahasan .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

**JULINCE KOGOYA-----NIM. 2017-11-110, “Analisis Pengelolaan Dana Kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya”** (Pembimbing I: H. Muhammad Ali dan Pembimbing II :Nur Aini)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana kampung di Kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya, dengan dibatasi pada indikator: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Subyek penelitian terdiri dari 20 orang yaitu 13 orang Aparat kampung dan 7 orang masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan studi pustaka. Analisa data menggunakan nilai skor maksimum dan minimum.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan dana kampung menunjukkan predikat kurang baik dengan skor 40, yang diperoleh dari indikator indikator perencanaan dengan skor 41,25; pelaksanaan dengan skor 38; penatausahaan dengan skor 37,75; pelaporan dengan skor 41,75 dan pertanggungjawaban dengan skor 41,25.

*Kata kunci : Pengelolaan, Dana Kampung*

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	jumlah dana kampung yang dicairkan.....	5
Tabel 2.1	matriks penelitian terdahulu .....	26
Tabel 3.1	interpretasi skor .....	36
Tabel 4.1	keadaan responden berdasarkan usia .....	41
Tabel 4.2	keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	42
Tabel 4.3	keadaan responden berdasarkan agama .....	43
Tabel 4.4	keadaan responden berdasarkan jenis kelamin .....	43
Tabel 4.5	keadaan responden berdasarkan pekerjaan .....	44
Tabel 4.6	tanggapan responden tentang kepala kampung, perangkat kampung, BMK, terlibat dalam membuat perencanaan .....	45
Tabel 4.7	kepala kampung, perangkat kampung, BMK, masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan .....	46
Tabel 4.8	tanggapan responden tentang adanya dialog pendapat antara aparatur kampung dan masyarakat.....	48
Tabel 4.9	tanggapan responden tentang adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat .....	49
Tabel 4.10	tanggapan responden tentang adanya aparat pengelola Keuangan yang ditunjuk kepala kampung .....	50
Tabel 4.11	tanggapan responden tentang pelaksanaan program dana Kampung yang direncanakan .....	51
Tabel 4.12	tanggapan responden tentang pembangunan dilakukan Sesuai aspirasi masyarakat .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka konseptual Penelitian .....	32
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Kuesioner
Lampiran	Data hasil penelitian
Lampiran	Surat penelitian dari LPPM
Lampiran	Surat rekomendasi dari Kepala Distrik Kolawa
Lampiran	Gambar hasil penelitian
Lampiran	Biodata penulis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang, Indonesia senantiasa dalam melakukan pembangunan dalam rangka

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Tahun 2020 tentang Desa, di akui secara yuridis.

Berdasarkan ketentuan ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang di hormati oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dari pengertian desa tersebut desa menetapkan sebagai satu organisasi pemerintah yang secara politis mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus warga dan komunitasnya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Nasional.

Desa menjadi bagian terpenting dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan nasional. Pendekatan pembangunan sebagai tuntutan partisipasi yang telah mengubah paradigma yang bersangkutan dengan posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga ikut berhak dalam perencanaan, pelaksana, pengawasan hingga bertanggungjawabannya. Dari pendekatan ini menyadari bahwa betapa pentingnya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan atas semua sumber daya yang dimilikinya. Dari model semacam ini sangat menekankan bahwa pemberdayaan dan inisiatif rakyat itu sangat penting sebagai sumber daya pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti

yaitu : Kabupaten Lanny Jaya cukup melimpah. mempunyai 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan Dengan ibu kota yang terletak di kecamatan Kolawak . Secara geografis kabupaten Lanny Jaya terletak di bagian Tenggara Provinsi papua. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya., bagian barat Kabupaten langsung dengan provinsi papua. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2020 mencapai 124.83 jiwa atau 13.12% (<https://LannyJayaikab.bps.go.id/>).

Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di kabupaten Lanny Jaya masih dalam tingkatan yang tinggi, maka dalam desa kondena dapat menerapkan program dari pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi kemsikinan terutama pada pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dibuat pemerintah untuk bisa membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. masyarakat suatu daerah bisa dilakukan karena kontribusi sebuah paguyuban perantau. Karenanya pemerintah daerah juga harus merespon berdirinya paguyuban-paguyuban tersebut. pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya di antaranya membentuk dan mengelola taman bacaan bagi masyarakat, membentuk paguyuban kelompok tani di seluruh Kabupaten, serta merintis berdirinya sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Lanny Jaya.

Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sama halnya dengan otonomi daerah (Riska Yuliani, 2020). untuk mengatur suatu desa itu sendiri maka membutuhkan dana atau biaya yang dapat memadai

sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat

(3) pendapatan desa terdiri dari :

1. Hasil Usaha Desa,
2. Hasil Kekayaan Desa,
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi,
4. Hasil Gotong Royong
5. Pendapatan Desa yang sah,

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kabupaten/kota yang meliputi: bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah diberi amanat untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan menggunakan prinsip keadilan. Perimbangan keuangan daerah kini sudah di soroti sebagai ikon utama dalam otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan Negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terdapat dua alasan dalam pentingnya kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah.

Masalah yang dihadapi desa saat ini adalah masih relative rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Termasuk pada aparatur desa yang notebene memegang kekuasaan keuangan administrasi pemerintahan dan pengelolaan Dana Desa (DD). Dana Desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam akhir-akhir masalah yang ada di desa yaitu adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga Dana Desa tidak digunakan dengan semestinya. Selain Dana Desa, desa juga mendapatkan kecuruan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa

baru-baru ini menjadi problem dalam pembagian APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 sudah sangat jelas, tetapi pertimbangan keuangan kabupaten desa menjadi tanda tanya besar.

Pemerintah kampung Kondena Kabupaten Lanny Jaya masih memiliki kendala dalam pengelolaan dana desa, hal ini terbukti dengan ungkapan salah satu tokoh adat atau masyarakat dari desa kondena Kabupaten Lanny jaya mencatatkan pencairan dana kampung di daerah tersebut untuk tahap pertama baru terealisasi 60%. Pada hal, anggaran untuk tahap kedua segera akan dicairkan pemerintah pusat, Sisanya masih mengendap di kas provinsi. Pencairan dana Tahap kedua 40%, Hal ini terjadi karena terlambatnya membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana yang telah terpakai di kampung tersebut. Data tentang jumlah nominal dana kampung dari tahun 2018-2020 yaitu:

- 1) Dalam persidangan APBD Tahun 2018 oleh ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya yang telah ditetapkan RP.1.3 Triliun, di dalamnya termasuk dana kampung. Selanjutnya dalam sidang anggota DPRD Kabupaten lanny jaya menetapkan anggaran pembelanjaan Daerah (APBD) tahun 2019 RP.1.4 Triliun lebih, ada kemajuan APBD dalam tahun ini di bandingkan dengan APBD Tahun 2018. Anggaran pembelanjaan daerah (APBD ) tahun 2020 telah menurun yaitu RP. 1.3 Triliun. Hal ini terjadi bukan karena menambah jumlah pemerintah desa, namun karena menambah jumlah anggota penduduk diseluruh kabupaten Lanny jaya.
- 2) Pada tahun 2018, Pemerintah pusat, telah menganggarkan sebesar RP.60,Triliun, realisasi dana kampung yang telah di kucurkan mencapai RP.59,86 Triliun atau 98,77% Tahun 2018 setiap Kampung mendapatkan rata-rata alokasi dana kampung

sebesar RP.800,4 Juta, tahun 2019 sebesar RP.933,9 juta dan tahun 2020 sebesar RP. 960,6 Juta

Tabel 1.1  
Jumlah Dana Yang Di Cairkan Untuk Kampung Kondena  
Tahun 2018-2020

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Alokasi Dana per desa	Persen (%)
1	2018	800,4 juta	98,77
2	2019	933,9 juta	99,77
3	2020	960,6 juta	99,88

Sumber data : Diambil dari Hasil Keputusan Dalam Sidang oleh Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, 2021

Dari alokasi dana kampung yang telah dilakukan oleh pemerintahan kampung Kondena , beberapa program tidak terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak semua masyarakat Kampung Kondena menerima bantuan, seperti bantuan bibit ternak babi tidak semua masyarakat mendapatkannya. Program pembinaan bagi pemuda – pemudi kampung tidak melibatkan semua pemuda-pemudi yang ada. Dan pembangunan rumah sehat molor dari waktu yang ditentukan (sumber data : wawancara dengan masyarakat Kampung Kondena , 2018).

Berdasarkan wawancara dengan aparat kampung yang mengatakan tidak semua program dapat berjalan dengan baik, sebab keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki perangkat

kampung, maka perencanaan dalam melakukan program seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga penyerapan dana kampung tidak sepenuhnya terserap baik.

Dalam pelaksanaan program, tidak semua program dilaksanakan pada saat dana kampung tersebut dikucurkan, karena ada program yang dilaksanakan setelah 6 bulan dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat (sumber data : wawancara dengan masyarakat Kampung Kondena , 2019)

Dalam penatausahaan, yang bertugas adalah sekretaris kampung dan Bendahara, namun tidak semua transaksi dapat dicatat dengan baik, seperti transaksi pembelian barang yang tidak disertai dengan nota, atau nota-nota pembelian yang tercecer.

Dalam hal pelaporan penggunaan dana kampung, perangkat kampung terkadang masih bingung dengan tata cara pembuatan laporan karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga dalam membuat laporan terkadang molor atau tidak tepat waktu dan masih membutuhkan bantuan orang dari luar dalam hal pembuatan laporan.

Dalam hal pertanggungjawaban, laporan yang diberikan kepada Bupati terkadang terlambat karena disebabkan oleh sumber daya perangkat kampung yang terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian : “Analisis Pengalokasian Dana Kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan yakni pengalokasian dana kampung dengan indikator yang diukur

meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di latar belakang di atas, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah pengelolaan dana Kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya?”

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian dana kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a) Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan tentang pengalokasian dana kampung.

##### **b) Kegunaan Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah dan bahan masukan yang positif tentang pengalokasian dana kampung

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Analisis**

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah :

- a) Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)
- b) Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Wiradi (2001:28) analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.

Menurut Komaruddin (2008:3), analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Secara umum analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara

menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.

## **2. Pengertian Pengalokasian Dana Kampung**

Dana kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Kampung ini diberikan untuk mengganti program pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Kampung, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap kampung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing kampung. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Kampung secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Kampung ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

## **3. Pengelolaan Dana Kampung**

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana

Kampung terintegrasi dengan APB Kampung yang merupakan pengelolaan keuangan kampung.

Dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana kampung, disebutkan bahwa penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung, dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana kampung diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) no 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan kampung. Didalamnya disebutkan tahapan - tahapan pengelolaan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan**

Menurut Handoko (2008:32) perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dari untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus memperetimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses

yang penting dan menentukan keberhasilan atau tindakan (Suharto, 2010: 71).

Lembaga Administrasi Negara merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut :

- 1) Pengertian Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- 2) Pengertian Perencanaan adalah proses penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 3) Pengertian Perencanaan yaitu usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Dari pengertian perencanaan di atas, memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan, sebagai berikut :

- a) Penentuan pilihan secara sadar berkaitan dengan tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b) Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya sulit pula direncanakan.
- 2) Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.

- 3) Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Kampung seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kampung dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung.

Proses perencanaan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung). Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) ini akan menentukan arah pembangunan kampung dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan (RKP Kampung) ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah kampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan kampung untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung yang diatur melalui Peraturan Kampung.

Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKP Kampung, dibutuhkan peran dari pemerintah kampung untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan Informan dan

menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung).

Pemerintah kampung menyusun perencanaan pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pengelolaan kampung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Kampung dan Badan Musyarah Kampung (BMK)
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung dievaluasi oleh Bupati selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Distrik harus melakukan penyempurnaan selama 7 (tujuh) hari jika Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung dinyatakan Rancangan Peraturan Kampung (Raperdes) tidak sesuai dan
- 4) Prioritas penggunaan dana kampung ditetapkan dalam musyawarah kampung antara Badan Musyawarah Kampung (BMK), Pemerintah Kampung dan Unsur Masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan dalam pengelolaan dana kampung adalah proses perencanaan pengelolaan dana kampung yang diselenggarakan Pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung (BMK) dan Unsur

Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian dana kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung. Maka dalam perencanaan pengelolaan dana kampung pihak-pihak yang ikut dalam perencanaan pengelolaan dana kampung adalah Sekretaris Kampung, Kepala Distrik, Badan Musyawarah Kampung (BMK) dan Unsur Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat.

#### **b. Pelaksanaan**

Menurut Westra (2003:82) pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Tjokroadmudjoyo(2007:23) pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Siagian (2008:38)mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung termasuk di

dalamnya terdapat Dana Kampung dilaksanakan oleh Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK). Kepala kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi Koordinator Tenaga Pengelola Keuangan Kampung (TPKK).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di kampung, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa (RKD). wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Kampung kepada setiap kampung dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Asas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 meliputi :

1) Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Kampung

2) Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsure masyarakat kampung

4) Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan kampung harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung atau sesuai ketetapan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah
- 2) Pemerintahan Kampung dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- 4) Pengadaan barang/jasa di Kampung diatur dengan Peraturan Bupati dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) dan disahkan Kepala kampung

**c. Penatausahaan**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah Kampung Kondena disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku

pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.

Penatausahaan dalam pengelolaan Dana Kampung berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu :

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara kampung
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir tahun
- 4) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Distrik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan
- 6) Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, bukti transaksi (kuitansi, nota faktur, memo) dan buku Bank

Menurut Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara kampung, bendahara kampung wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di kampung Kondena menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa/kampung (siskeudes).

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah kampung Kondena yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Sistem Keuangan Desa/kampung (Siskeudes) ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya Sistem Keuangan Desa/kampung (siskeudes) ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya;

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- 2) Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBK.
- 3) Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBK dan dilakukan dengan Rekening Kas Kampung.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kampung Kondena , menurut beberapa informan: Pernyataan beberapa informan diatas menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kampung Kondena . Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah kampung hanya menerapkan prinsip *urgensi* atau kepentingan saja. Belum adanya kriteria-kriteria tertentu untuk dapat melakukan persetujuan perubahan anggaran. Peran dari pemerintah kampung disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah Kampung Kondena :

- a. Buku kas umum
- b. Buku pembantu pajak

- c. Buku pembantu bank
- d. Buku pemasukan

Penatausahaan dalam pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik kampung.

Tugas bendahara dalam pengelolaan Dana Kampung yaitu :

- 1) Menerima
- 2) Menyimpan
- 3) Menyetorkan
- 4) Membayar
- 5) Menatausahakan dan
- 6) Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung)

#### **d. Pelaporan**

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan kampung, Pemerintah Kampung wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Kepala Distrik maupun ke Bupati. Disamping itu pemerintah kampung dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Kampung sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung), hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Kampung. Informan juga menjelaskan demikian. Laporan realisasi Dana Kampung setiap

tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan kampung termasuk di dalamnya Dana Kampung, Kepala Kampung wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Kampung dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Kampung dilaporkan kepada BPD.

Proses pelaporan pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung. Kepala kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APB Kampung) ke Bupati/Walikota melalui Kepala Distrik berupa Laporan Semester I dan Semester II.

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK) Semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah adalah sebuah konsep etika yang berhubungan administrasi public pemerintahan. Pertanggungjawaban merupakan kemampuan untuk memberikan jawaban, kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami atas berbagai aktivitas yang dilakukan.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Kampung yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib

membuat laporan dari pengelolaan Dana Kampung. Penyampaian laporan realisasi Dana Kampung secara tertulis oleh Kepala Kampung (pemerintah kampung) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung :

1)                    Tranparansi dan Akuntabilitas

Tranparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

1.a Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah kampung Kondena memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut beberapa informan:

Berdasarkan uraian dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi yang dibangun oleh pemerintah kampung Kondena menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependudukan dan data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui, papan pengumuman di Kantor Kampung, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT.

#### 1.b Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung. Mekanisme laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung

(APBK) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dilampiri sebagai berikut :

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK)
- 2) Format laporan kekayaan milik kampung per 31 Desember
- 3) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kampung (APBK) disampaikan maksimal satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### **4. Pengertian Desa/Kampung**

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.

Organisasi Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik

dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah lain. dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2019. 2 Sidik Permana, Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan.yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, 3. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa,

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Tipologi Desa Pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa digunakan untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa. untuk mengetahui tipologi desanya pemerintah harus menggunakan data indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, ekonomi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, hal. 25 Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, (Jakarta: kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 12 Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjalin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM di definisikan menjadi 5 (lima) status desa, diantaranya:

- a) Desa Mandiri atau disebut desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
- b) Desa Maju atau desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- c) Desa Berkembang atau disebut desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya social ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

- d) Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya social, ekonomi,dan ekologi tapi belum atau kurang mengelolanya dalm upaya peingkatan kesejahteraan desa, kualitas manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
- e) Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, gocangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan pada matriks penelitian terdahulu sebagai berikut :

Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Referensi
1	Kartika, et al, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja	Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi,	Jurnal Prodi Administras i Publik Unud Vol 4 No.7

			akuntabilitas, dan prinsip <i>value of money</i> belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.	
2	Rahayu, 2017	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan	Jurnal UNS Vol.2 No.1, 2017

			<p>infrastruktur saja.</p> <p>Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya.</p> <p>Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut:</p> <p>mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial,</p> <p>meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat</p>	
--	--	--	--	--

			dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.	
3	Aidil, Amand a Fitra, 2016	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	mendapatkan temuan yakni penggunaan Dana Desa di desa Panggunharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Kemudian pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun	Jurnal ugm Vol.2 No.5 2016

			<p>administrasi sudah baik. Pelaporan penggunaan Dana Desa di desa Panggunharjo selain dilakukan secara manual yaitu mencatat transaksi ke dalam Buku Kas umum, juga secara komputerisasi yaitu mencatat transaksi menggunakan aplikasi siskeudes.</p>	
--	--	--	--	--

### **C. Definisi Operasional**

Dari hasil kajian di atas yang berkaitan dengan variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu : Analisis Pengelolaan Dana Kampung, maka penulis memberikan definisi secara operasional. Analisis pengelolaan dana kampung adalah kegiatan menguraikan tentang alokasi dana kampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi kampung oleh Pemerintah Kampung Kondena . dengan indikatornya sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan adalah penyusunan kegiatan yang akan dilakukan yang melibatkan Kepala Kampung Kondena , Badan Musyawarah

Kampung (BMK) Kondena , perwakilan Tokoh Agama Kampung Kondena dan Tokoh Masyarakat Kampung Kondena yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Kampung Kondena (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan mendengar pendapat dari masyarakat

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan untuk melaksanakan rencana-rencana atau program-program yang telah ditetapkan, Kepala Kampung Kondena sebagai pemegang kekuasaan dan menunjuk aparat kampung sebagai pengelola keuangan dana kampung, adanya pelaksanaan dari program yang ditetapkan dan pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan, adanya penyertaan bukti transaksi, adanya buku kas pelaporan dan adanya pembukuan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah adanya pelaporan dana kampung, pelaporan dilakukan tepat waktu, kepala kampung melaporkan penggunaan dana kampung dan pelaporan langsung disampaikan kepada Bupati.

e. Pertanggungjawaban

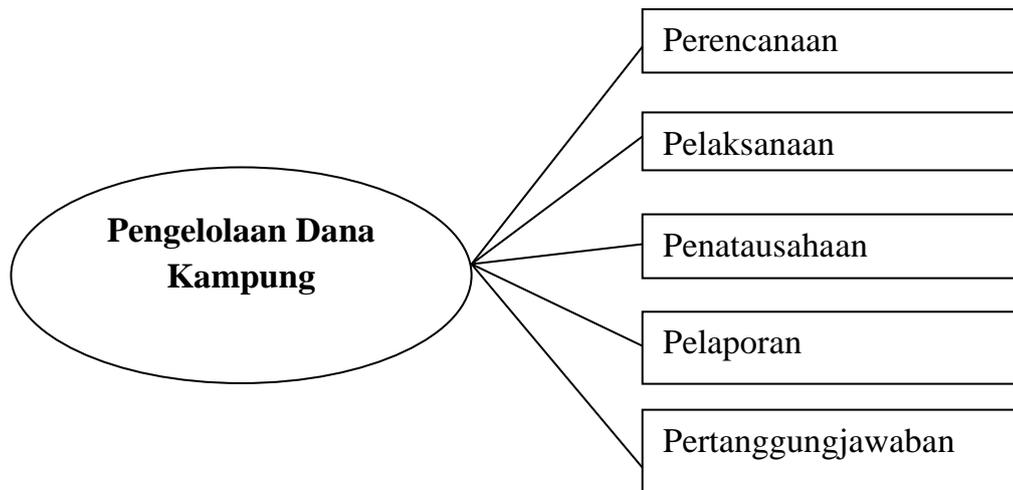
Pertanggungjawaban adalah adanya penjelasan dari Kepala Kampung dalam menggunakan dana kampung, laporan dilakukan secara tertulis, pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka, dan disampaikan secara jujur.

#### D. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, maka kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Mengacu pada gambar diatas, maka penulis menganalisis pengelolaan dana kampung dengan indikatornya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Kondena Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini  $\pm 2$  (dua) bulan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sarwono (2006 : 28) mengatakan bahwa : penelitian deskriptif bertujuan membuat pencatatan/lukisan/deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan pengalokasian dana kampung Kondena Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya. Pengalokasian dana kampung yang dideskripsikan berdasarkan pada: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2008:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Populasi menurut Sarwono (2006 : 22), adalah seluruh penduduk yang dimasukkan untuk diteliti disebut populasi yang paling sedikit mempunyai sikap yang sama, maka yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah aparat kampung Kondena dan masyarakat sebanyak 20 orang. Aparat Kampung yang berjumlah 13 orang dan masyarakat sebanyak 7 orang yang terdiri dari tokoh adat sebanyak 2 orang, tokoh agama 3 orang dan tokoh pemuda 2 orang (sumber data : Kantor Kampung Kondena, 2021)

## 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampel jenuh*. Menurut Sugiyono (2008:99) sampel ini digunakan apabila jumlah populasi kurang dari 30 orang. Maka sampel penelitian berjumlah 20 orang yang terdiri dari 13 orang aparat Kampung Kondena dan 7 orang perwakilan masyarakat.

## C. Instrumen penelitian

Menurut Sugiyono (2008:118), mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban melalui beberapa alternative saja. Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini adalah *Kuesioner* dengan menggunakan *skala likert*.

Menurut **Sugiyono** (2008:107) *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. dengan kategori pilihan jawaban sebagai berikut:

- a. Sangat baik                      skor 4
- b. Baik                                skor 3
- c. Kurang baik                    skor 2
- d. Tidak baik                       skor 1

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

**a. Kuesioner (daftar pertanyaan)**

Menurut Sugiyono (2008:199) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

**b. Observasi**

Menurut Ridwan (2004:104) teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peninjauan secara cermat mengenai pengalokasian dana kampung di Kampung Kondena.

**c. Kepustakaan**

Menurut Sarwono (2006:25) kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Menurut Sugiyono (2008: 120) kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literatur, diklat-diklat, bahkan kuliah, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

## E. Teknik Analisa Data

Menurut Hasan (2006:24), teknik analisis data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus, sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa skor yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum.

$$\begin{aligned}\text{Nilai maksimum} &= 4 \times \text{jumlah responden} \\ &= 4 \times 20 \\ &= 80\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai minimum} &= 1 \times \text{responden} \\ &= 1 \times 20 \\ &= 20\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai maksimum (80) dan nilai minimum (20), maka dapat dibuatkan interpretasi nilai skor sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tabel Interpretasi Nilai**

No	Interval Skor	Predikat
1	$60 < \text{jumlah skor} \leq 80$	Sangat baik
2	$40 < \text{jumlah skor} \leq 60$	Baik
3	$20 < \text{jumlah skor} \leq 40$	Kurang baik
4.	$1 < \text{jumlah skor} \leq 20$	Tidak baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Kampung Kondena**

Kampung Kondena merupakan bagian dari Distrik Kolawa Kabupaten Lanny Jaya yang terbentuk pada tahun 1952, yang berawal dari program pemerintah tentang transmigrasi kependudukan untuk penyebaran dan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Kemudian tercetuslah sebuah kampung di wilayah Lanny Jaya yang akan menjadi sasaran lokasi transmigrasi dengan nama Kondena dan Kepala Kampung pertama yang menjabat yaitu Bapak Kerius Kogoya.

Kampung Kondena kemudian disahkan pembentukannya oleh Bupati Doren Wakerwa yang mengacu pada Undang-Undang No.5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya.

###### **b. Jumlah penduduk**

Kampung Kondena mempunyai jumlah penduduk sebanyak 58 Kepala Keluarga (KK).

###### **c. Batas-batas Wilayah**

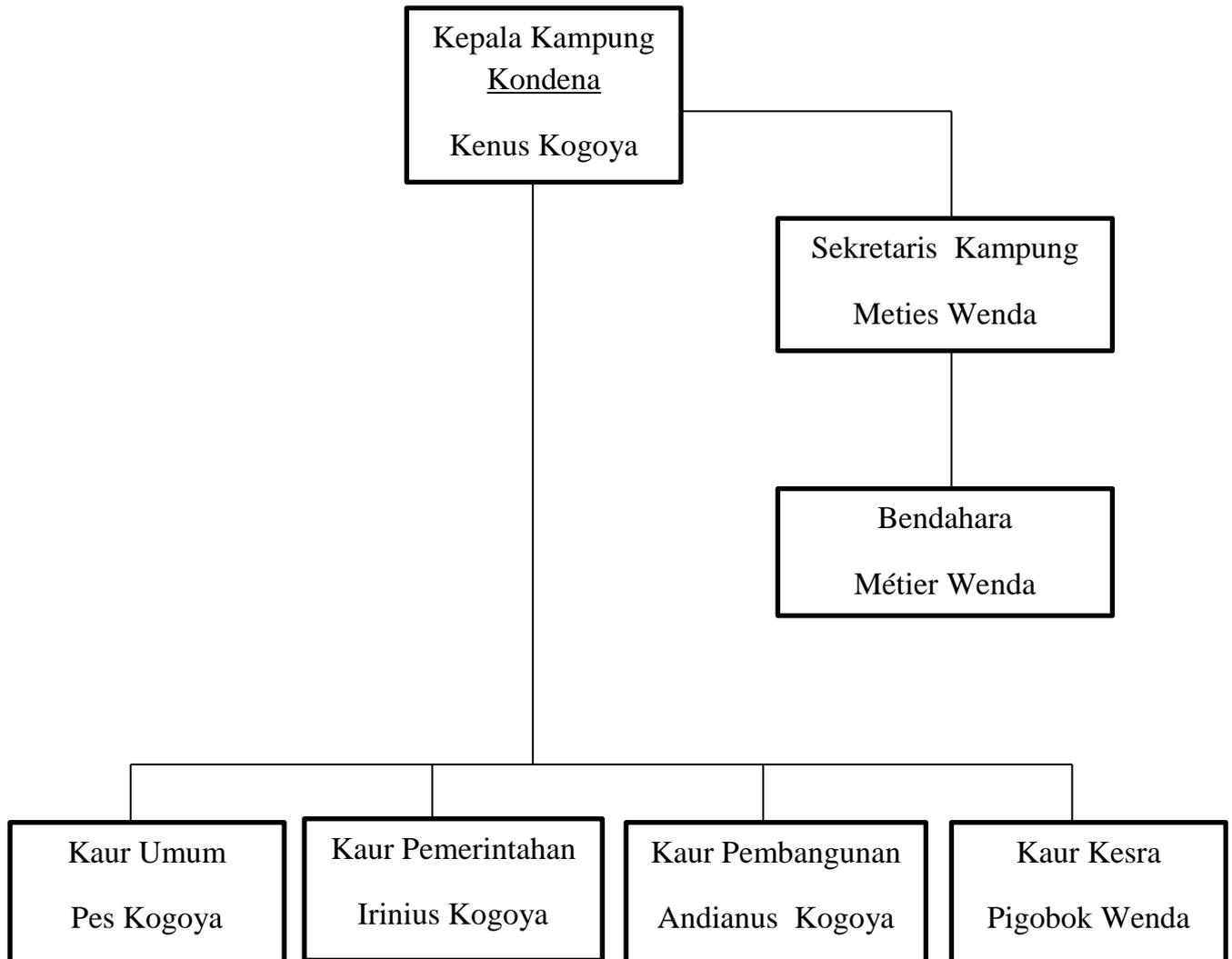
Kampung Kondena mempunyai batas-batas wilayah administrative sebagai berikut :

- 1) Bagian barat berbatasan dengan Distrik Makki
- 2) Bagian timur berbatasan dengan Distrik Pirime
- 3) Bagian utara berbatasan dengan Kampung Lelam
- 4) Bagian selatan berbatasan dengan Kampung Gondura

###### **d. Struktur organisasi Kampung Kondena**

Struktur organisasi pada Kampung Kondena disajikan pada gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Kampung Kondena Distrik Kolawak  
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya



e. Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Pemerintahan Kampung Kondena

Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam

melaksanakan tugasnya, kepala kampung mempunyai wewenang (sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2008)

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BMK
- b) Mengajukan rancangan peraturan kampung
- c) Menetapkan peraturann kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BMK
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kampung mengenai APB kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BMK
- e) Membina kehidupan masyarakat kampung
- f) Membina perekonomian kampung
- g) Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif
- h) Mewakili kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kewajiban kepala kampung, adalah sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung

- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat di kampung
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu, kewajiban kepala kampung untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BMK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung kepada masyarakat.

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada di bawah kepala kampung. Sekretaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi. Sekretaris kampung mempunyai tugas :

- a) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah
- b) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah kampung dan kemasyarakatan
- c) Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga kampung, surat-menyurat dan kearsipan

- d) Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat
- e) Menyusun laporan pemerintah kampung
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kampung
- g) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris kampung dibantu 2 orang staf, yaitu staf umum dan staf keuangan

Unsur teknis, berada di bawah kepala kampung dan bertanggung jawab kepada kepala kampung. Unsur teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR). Unsur teknis terdiri dari :

- 1) Urusan pembangunan
- 2) Urusan kesejahteraan rakyat
- 3) Urusan pemerintahan
- 4) Urusan umum

## 2. Keadaan Responden

Keadaan responden pada penelitian ini terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

### a. Keadaan responden berdasarkan usia

Keadaan responden berdasarkan usia disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Responden Berdasarkan usia**

No.	Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	20 – 30	2	10,00
2.	31 – 40	9	45,00
3.	41 – 50	6	30,00
4.	51 – 60	3	15,00
Jumlah		20	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa responden dengan umur 20 – 30 tahun sebanyak 2 orang (10 %),

responden dengan umur 31 – 40 tahun sebanyak 9 orang (45 %), responden dengan umur 41 – 50 tahun sebanyak 6 orang (30 %) dan responden yang berumur 51 – 60 tahun sebanyak 3 orang (15 %). Responden dengan usia 31 – 40 tahun dengan jumlah paling banyak.

b. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Sarjana (S I)	3	15,00
2.	SMA	7	35,00
3.	SMP	3	15,00
4.	SD	5	25,00
5.	Tidak Sekolah	2	10,00
Jumlah		20	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S I) sebanyak 3 orang (15 %), SMA sebanyak 7 orang (35 %), responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 orang (15 %) dan responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 5 orang (25 %) dan responden yang tidak bersekolah sebanyak 2 orang (10 %).

c. Keadaan responden berdasarkan agama

Keadaan responden berdasarkan agama disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Frekuensi	Persentase
1.	Kristen Protestan	17	85,00
2	Katholik	3	15,00

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa responden paling banyak beragama Kristen Protestan (85 %) dan sisanya sebanyak 3 orang beragama Kristen Katholik (15 %).

d. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	20	100
2	Perempuan	-	0
Jumlah		20	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa seluruh responden berjenis kelamin laki-laki (100 %).

e. Keadaan responden berdasarkan pekerjaan

Keadaan responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	4	20,00
2	Aparatur Kampung	12	60,00
3	Tokoh Agama/Pendeta	3	15,00
4	Kepala Suku	1	5,00
Jumlah		20	100

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa responden paling banyak bekerja sebagai aparatur kampung sebanyak 12 orang (60 %), Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4 orang (20 %), Tokoh Agama/Pendeta sebanyak 3 orang (15 %) dan Kepala Suku sebanyak 1 orang (5 %).

### **3. Analisa Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya dengan cara pengamatan dan pembagian kuesioner kepada responden. Dengan variabel pengelolaan dana kampung dengan indikatornya : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### **a. Indikator perencanaan**

Indikator perencanaan mempunyai beberapa sub indikator sebagai berikut :

- 1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung

Tanggapan responden tentang Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung disajikan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6  
Tanggapan responden tentang Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	4	16
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	4	8
4.	Tidak baik	1	10	10
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan skor 16; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8; tidak baik sebanyak 10 orang dengan skor 10.

Ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung kurang baik.

- 2) Kepala kampung, perangkat kampung, BMK, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan

Tanggapan responden tentang Kepala Kampung, perangkat kampung, BMK, perwakilan tokoh agama dan

masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7

Tanggapan responden tentang Kepala Kampung , perangkat kampung, bmk, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	6	24
2.	Baik	3	5	15
3.	Kurang baik	2	3	6
4.	Tidak baik	1	6	6
Nilai			20	51

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas diperoleh skor sebesar 51 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan skor 24; baik sebanyak 5 orang dengan skor 15; kurang baik sebanyak 3 orang dengan skor 6; tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6.

Ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung, perangkat kampung, BMK, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan baik.

### 3) Adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tanggapan responden tentang adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disajikan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8  
Tanggapan responden tentang adanya Rencana Kerja  
Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah (RPJM)

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	4	8
4.	Tidak baik	1	11	11
Nilai			20	37

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas diperoleh skor sebesar 37 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8; tidak baik sebanyak 11 orang dengan skor 11.

Ini menunjukkan bahwa adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kurang baik.

- 4) Adanya dialog pendapat antara aparat kampung dan masyarakat

Tanggapan responden tentang adanya dialog pendapat antara aparat kampung dan masyarakat disajikan pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9  
Tanggapan responden tentang adanya dengar pendapat  
antara aparat kampung dan masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	7	14
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	37

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas diperoleh skor sebesar 37 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 7 orang dengan skor 14; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat kurang baik.

**b. Indikator Pelaksanaan**

Indikator pelaksanaan mempunyai beberapa sub indikator sebagai berikut :

- 1) Adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat

Tanggapan responden tentang adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat disajikan pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10  
Tanggapan responden tentang adanya dengar pendapat  
antara aparat kampung dan masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	7	14
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	37

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas diperoleh skor sebesar 37 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 7 orang dengan skor 14; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat kurang baik.

2) Adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung

Tanggapan responden tentang adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung disajikan pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11  
Tanggapan responden tentang adanya aparat Pengelola  
Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	7	14
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	37

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas diperoleh skor sebesar 37 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 7 orang dengan skor 14; dan tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung kurang baik.

### 3) Pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan

Tanggapan responden tentang pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan disajikan pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12  
Tanggapan responden tentang pelaksanaan program dana  
kampung yang direncanakan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	7	14
4.	Tidak baik	1	8	8
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 7 orang dengan skor 14; tidak baik sebanyak 8 orang dengan skor 8.

Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan kurang baik.

4) Pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat

Tanggapan responden tentang pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat disajikan pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13  
Tanggapan responden tentang pembangunan dilakukan  
sesuai aspirasi masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	4	12
3.	Kurang baik	2	4	8

4.	Tidak baik	1	10	10
Nilai			20	38

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.13 di atas diperoleh skor sebesar 38 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 4 orang dengan skor 12; kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8; tidak baik sebanyak 10 orang dengan skor 10.

Ini menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat kurang baik.

### c. Indikator Penatausahaan

Indikator penatausahaan terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut :

- 1) Adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan

Tanggapan responden tentang adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan disajikan pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14

Tanggapan responden tentang adanya pencatatan transaksi yang dilakukan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	1	4
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	8	16
4.	Tidak baik	1	8	8
Nilai			20	37

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.14 di atas diperoleh skor sebesar 37 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 1 orang dengan skor 4; baik sebanyak 3 orang

dengan skor 9; kurang baik sebanyak 8 orang dengan skor 16; tidak baik sebanyak 8 orang dengan skor 8.

Ini menunjukkan bahwa adanya pencatatan transaksi yang dilakukan kurang baik.

2) Adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan

Tanggapan responden tentang adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan disajikan pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15  
Tanggapan responden tentang adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	9	18
4.	Tidak baik	1	7	7
Nilai			20	39

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.15 di atas diperoleh skor sebesar 39 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 9 orang dengan skor 18; tidak baik sebanyak 7 orang dengan skor 7.

Ini menunjukkan bahwa adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan kurang baik.

3) Adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung

Tanggapan responden tentang adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung disajikan pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16  
Tanggapan responden tentang adanya buku kas dalam  
pelaporan dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	6	12
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	39

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.16 di atas diperoleh skor sebesar 39 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 6 orang dengan skor 12; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung kurang baik.

- 4) Melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang tanggapan responden tentang melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang disajikan pada tabel 4.17 berikut :

Tabel 4.17  
Tanggapan responden tentang melakukan pembukuan,  
inventarisasi, dan pelaporan barang

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	6	12

4.	Tidak baik	1	10	10
Nilai			20	36

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.17 di atas diperoleh skor sebesar 36 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 6 orang dengan skor 12; tidak baik sebanyak 10 orang dengan skor 10.

Ini menunjukkan bahwa melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang kurang baik.

d. Indikator Pelaporan

Indikator pelaporan terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut :

1) Adanya pelaporan alokasi dana kampung

Tanggapan responden tentang adanya pelaporan alokasi dana kampung disajikan pada tabel 4.18 berikut :

Tabel 4.18  
Tanggapan responden tentang adanya pelaporan alokasi dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	4	16
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	3	6
4.	Tidak baik	1	11	11
Nilai			20	39

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.18 di atas diperoleh skor sebesar 39 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan skor 16; baik sebanyak 2 orang

dengan skor 6; kurang baik sebanyak 3 orang dengan skor 6; tidak baik sebanyak 11 orang dengan skor 11.

Ini menunjukkan bahwa adanya pelaporan alokasi dana kampung kurang baik.

2) Adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan

Tanggapan responden tentang adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan disajikan pada tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19  
Tanggapan responden tentang adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	5	10
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.19 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan kurang baik.

3) Adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung

Tanggapan responden tentang adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung disajikan pada tabel 4.20 berikut :

Tabel 4.20  
Tanggapan responden tentang adanya buku kas dalam  
pelaporan dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	5	20
2.	Baik	3	4	12
3.	Kurang baik	2	5	10
4.	Tidak baik	1	6	6
Nilai			20	48

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.20 di atas diperoleh skor sebesar 48 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan skor 20; baik sebanyak 4 orang dengan skor 12; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10; tidak baik sebanyak 6 orang dengan skor 6.

Ini menunjukkan bahwa adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung kurang baik.

- 4) Aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

Tanggapan responden tentang aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang disajikan pada tabel 4.21 berikut :

Tabel 4.21  
Tanggapan responden tentang aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	7	14
4.	Tidak baik	1	8	8
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.21 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 7 orang dengan skor 14; tidak baik sebanyak 8 orang dengan skor 8.

Ini menunjukkan bahwa aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang kurang baik.

e. Indikator Pertanggungjawaban

Indikator pertanggungjawaban terdiri dari beberapa sub indikator sebagai berikut :

- 1) Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung

Tanggapan responden tentang Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung disajikan pada tabel 4.22 berikut :

Tabel 4.22  
Tanggapan responden tentang Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	5	10
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.22 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa kepala kampung kurang dapat menjelaskan penggunaan dana kampung.

2) Laporan dilakukan secara tertulis

Tanggapan responden tentang laporan dilakukan secara tertulis disajikan pada tabel 4.23 berikut :

Tabel 4.23  
Tanggapan responden tentang laporan dilakukan secara tertulis

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	5	20
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	5	10
4.	Tidak baik	1	7	7

Nilai	20	46
-------	----	----

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.23 di atas diperoleh skor sebesar 46 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 orang dengan skor 20; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10 ; tidak baik sebanyak 7 orang dengan skor 7.

Ini menunjukkan bahwa laporan dilakukan secara tertulis baik.

- 3) Pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan diketahui oleh masyarakat

Tanggapan responden tentang pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan diketahui oleh masyarakat disajikan pada tabel 4.24 berikut :

Tabel 4.24

Tanggapan responden tentang pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan diketahui oleh masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	5	10
4.	Tidak baik	1	9	9
Nilai			20	40

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.24 di atas diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 5 orang dengan skor 10; tidak baik sebanyak 9 orang dengan skor 9.

Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepala kampung kurang terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

4) Semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur

Tanggapan responden tentang semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur disajikan pada tabel 4.25 berikut :

Tabel 4.25  
Tanggapan responden tentang semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	4	8
4.	Tidak baik	1	10	10
Nilai			20	39

Sumber data : diolah dari data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.25 di atas diperoleh skor sebesar 39 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 4 orang dengan skor 8; tidak baik sebanyak 10 orang dengan skor 10.

Ini menunjukkan bahwa semua penggunaan dana kampung kurang disampaikan secara jujur.

## B. Pembahasan

Untuk menunjukkan hasil penilaian dari analisis data, maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasil pengelolaan dana kampung Kondena Distrik Kolawak sebagai berikut :

### 1. Rata-rata skor indikator perencanaan

Perencanaan adalah penyusunan kegiatan yang akan dilakukan yang melibatkan Kepala Kampung Kondena , Badan Musyawarah Kampung (BMK) Kondena , perwakilan Tokoh Agama Kampung Kondena dan Tokoh Masyarakat Kampung Kondena yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Kampung Kondena (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan mendengar pendapat dari masyarakat

Rata-rata sub indikator perencanaan disajikan pada tabel 4.26 sebagai berikut :

**Tabel 4.26**  
**Rata-rata Indikator Perencanaan**

<b>No.</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Nilai skor</b>	<b>Predikat</b>
1	Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung	40	Kurang baik
2	kepala kampung, perangkat kampung, bmk, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan	51	Baik
3	Adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	37	Kurang baik
4	Adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat	37	Kurang baik
<b>Jumlah</b>		165	
<b>Rata-rata skor</b>		41,25	Baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.26 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 41,25 berada pada predikat baik yang menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana kampung baik. Ini diperoleh dari sub indikator Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung (skor 40), kepala kampung, perangkat kampung, bmk, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan (skor 51), Adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (37) dan Adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat (skor 37).

## 2. Rata-rata skor indikator pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan untuk melaksanakan rencana-rencana atau program-program yang telah ditetapkan, Kepala Kampung Kondena sebagai pemegang kekuasaan dan menunjuk aparat kampung sebagai pengelolaa keuangan dana kampung, adanya pelaksanaan dari program yang ditetapkan dan pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat.

Rata-rata sub indikator pelaksanaan disajikan pada tabel 4.27 sebagai berikut :

**Tabel 4.27**  
**Rata-rata Indikator Pelaksanaan**

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat	37	Kurang baik
2	Adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung	37	Kurang baik
3	Pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan	40	Kurang baik
4	Pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat	38	Kurang baik
<b>Jumlah</b>		152	
<b>Rata-rata skor</b>		38	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.27 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 38 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik. Ini diperoleh dari sub indikator Adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat (skor 37), Adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung (skor 37), Pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan (skor 40) dan Pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat (skor 38).

### 3. Rata-rata skor indikator penatausahaan

Penatausahaan adalah adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan, adanya penyertaan bukti transaksi, adanya buku kas pelaporan dan adanya pembukuan.

Rata-rata sub indikator penatausahaan disajikan pada tabel 4.28 sebagai berikut :

**Tabel 4.28**  
**Rata-rata Indikator Penatausahaan**

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan	37	Kurang baik
2	Adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan	39	Kurang baik
3	Adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung	39	Kurang baik
4	Aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang	36	Kurang baik
<b>Jumlah</b>		151	
<b>Rata-rata skor</b>		37,75	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.28 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 37,75 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan dana kampung kurang baik. Ini diperoleh dari sub indikator Adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan (skor 37), Adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan (skor 39), Adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung (skor 39), dan Aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang (skor 36).

#### 4. Rata-rata skor indikator pelaporan

Pelaporan adalah adanya pelaporan dana kampung, pelaporan dilakukan tepat waktu, kepala kampung melaporkan

penggunaan dana kampung dan pelaporan langsung disampaikan kepada Bupati.

Rata-rata sub indikator pelaporan disajikan pada tabel 4.29 sebagai berikut :

**Tabel 4.29**  
**Rata-rata Indikator Pelaporan**

<b>No.</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Nilai skor</b>	<b>Predikat</b>
1	Adanya pelaporan alokasi dana kampung	39	Kurang baik
2	Pelaporan dilakukan secara tepat waktu	40	Kurang baik
3	Kepala Kampung langsung melaporkan alokasi dana kampung yang digunakan	48	Baik
4	Kepala kampung langsung melaporkan kepada Bupati	40	Kurang baik
<b>Jumlah</b>		167	
<b>Rata-rata skor</b>		41,75	Baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.29 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 41,75 berada pada predikat baik yang menunjukkan bahwa pelaporan dalam pengelolaan dana kampung baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.29 diatas menunjukkan bahwa pelaporan dalam pengelolaan dana kampung baik. Ini diperoleh dari sub indikator Adanya pelaporan alokasi dana kampung (skor 39), Pelaporan dilakukan secara tepat waktu (skor 40), Kepala Kampung langsung melaporkan alokasi dana kampung yang digunakan (skor 48), dan Kepala kampung langsung melaporkan kepada Bupati (skor 40).

5. Rata-rata skor indikator pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah adanya penjelasan dari Kepala Kampung dalam menggunakan dana kampung, laporan dilakukan secara tertulis, pertanggungjawaban dilakukan secara terbuka, dan disampaikan secara jujur.

Rata-rata sub indikator pertanggungjawaban disajikan pada tabel 4.30 sebagai berikut :

**Tabel 4.30**  
**Rata-rata Indikator Pertanggungjawaban**

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung	40	Kurang baik
2	Laporan dilakukan secara tertulis	46	Baik
3	Pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan diketahui oleh masyarakat	40	Kurang baik
4	Semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur	39	Kurang baik
<b>Jumlah</b>		165	
<b>Rata-rata skor</b>		41,25	Baik

Sumber data : olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.30 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 41,25 berada pada predikat baik yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kampung baik. Ini diperoleh dari sub indikator Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung (skor 40), Laporan dilakukan secara tertulis (skor 46), Pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan

diketahui oleh masyarakat (skor 40), dan Semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur (skor 39).

6. Hasil rata-rata variabel pengelolaan dana kampung

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas diperoleh hasil rata-rata variabel pengelolaan dana kampung disajikan pada tabel 4.31 di bawah ini :

**Tabel 4.31**  
**Hasil Rata-rata variabel Pengelolaan Dana Kampung**

No.	Indikator	Skor	Predikat
1.	Perencanaan	41,25	Baik
2.	Pelaksanaan	38	Kurang baik
3.	Penatausahaan	37,75	Kurang baik
4.	Pelaporan	41,75	Baik
5.	Pertanggungjawaban	41,25	Baik
Jumlah		200	
Rata-rata		40	Kurang Baik

Sumber data : hasil olahan data primer, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.31 di atas, menunjukkan hasil rata-rata pengelolaan dana kampung diperoleh skor sebesar 40 yang berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampung di Kampung Kondena kurang baik. Hasil ini diperoleh dari indikator perencanaan dengan skor 41,25; pelaksanaan dengan skor 38; penatausahaan dengan skor 37,75; pelaporan dengan skor 41,75 dan pertanggungjawaban dengan skor 41,25. Seluruh skor hasil penghitungan untuk semua indikator berada pada predikat baik dan kurang baik.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.31 di atas menunjukkan skor terendah berasal dari indikator pelaksanaan dengan skor 38 yang berada pada predikat kurang baik yang berasal dari dari sub indikator

adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat (skor 37), dan adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung (skor 37) dengan skor terendah. Yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dari program kurang berjalan dengan baik dan aparat yang mengelola dana kampung kurang memiliki kemampuan dalam mengelola dana kampung.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang hampir sama dengan penelitian milik Kartika, et al, 2018 dengan judul penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *value of money* belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian milik Aidil, Amanda Fitra, 2016 dengan judul penelitian Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Kemudian pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Pelaporan penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo selain dilakukan secara manual yaitu mencatat transaksi ke dalam Buku Kas umum, juga secara komputerisasi yaitu mencatat transaksi menggunakan aplikasi siskeudes.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisa data diperoleh skor rata-rata variabel pengelolaan dana kampung Kondena Distrik Kolawak Kabupaten Lanny Jaya dengan rata-rata 40 yang berada pada predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator indikator perencanaan dengan skor 41,25; pelaksanaan dengan skor 38; penatausahaan dengan skor 37,75; pelaporan dengan skor 41,75 dan pertanggungjawaban dengan skor 41,25.

Pelaksanaan merupakan indikator yang paling rendah dalam pengelolaan dana kampung, sedangkan pelaporan dengan skor tertinggi, karena penggunaan dana kampung baik dilaporkan oleh Kepala Kampung.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Indikator perencanaan
  - a. Hendaknya dalam perencanaan melibatkan seluruh masyarakat, agar seluruh masukan, saran dan pendapat dapat ditampung dalam membangun kampung
  - b. Hendaknya dalam perencanaan didahulukan penggunaan dana untuk pembangunan yang sangat urgen bagi masyarakat
- 2) Indikator pelaksanaan
  - a. Hendaknya pelaksanaan dilakukan oleh aparat yang betul-betul memiliki keahlian
  - b. Hendaknya pelaksanaan penggunaan dana kampung mengikuti waktu yang telah ditentukan

- 3) Indikator penatausahaan
  - a. Hendaknya seluruh pengeluaran yang berasal dari penggunaan dana kampung memiliki pembukuan untuk pencatatan keluar masuknya dana kampung
- 4) Indikator pelaporan
  - a. Hendaknya kepala kampung dan aparat kampung melakukan pelaporan secara bersama-sama
  - b. Hendaknya pelaporan disampaikan terbuka kepada masyarakat
- 5) Indikator pertanggungjawaban
  - a. Hendaknya pertanggungjawaban dana kampung diketahui oleh seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan curiga
  - b. Pertanggungjawaban hendaknya disampaikan secara jujur

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aidil, Amanda Fitra, 2016 melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*” (halaman 24)
- Adisasmitha, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Afdi Nizar, Mohammad, 2004, *Kamus Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta
- Atmosudirjo, S Prajudi, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Administrasi dan Manajemen Umum*, Karya Kencana, Yogyakarta
- Tjokroadmudjoyo, Bintoro, *Pengelolaan Pendapatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ferdinand, Augusty, 2011, *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, Edisi 3*, AGF Books, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016, Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Jurnal
- Handoko, T Hani, 2008, *Manajemen*, Edisi ke II, BPFE, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Tim Penyusun Pusat Kamus, Balai Pustaka, Jakarta
- Kartika et al, 2018 melakukan penelitian yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja*” (halaman
- Komaruddin, 2008, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara , Jakarta
- Murniati, Mukhlisi, 2005, *Sakinah Finance : Pengelolaan Keuangan*, Tinta Medina, Jakarta
- Ngongare, 2016, *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan* (halaman 5)
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta

- Putra, Hendi 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo kabupaten Kediri*, Journal Unair, Universitas Airlangga
- Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang* (halaman 23)
- Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Deepublish, Jakarta
- Robert T. Kiyosaki dan Sharon L, 1994, *Pengelolaan Aset*, Alih Bahasa Dwi Helly, Gramedia, Jakarta
- Siagian, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ke 10, Bumi Aksara, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 2002, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama , Bandung
- Syahrul, 2002, *Analisa Laporan Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Westra, Pariata, 2003, *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016, “*Sistem Akuntansi Dana Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul* (halaman 4)

## **B. Dokumen**

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya, No. 4 tahun 2007 Mengenai Penggunaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung

Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 4 tahun 2016 mengenai pengelolaan  
Keuangan Desa

Lampiran : 1

**A. Identitas Responden**

No. responden : .....

Usia : Beri tanda  $\surd$  atau X

a. 20 – 30  c. 41 – 50

b. 31 – 40  d. 51 – 60

Tingkat pendidikan : .....

Agama : .....

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

**B. Daftar pernyataan**

**DAFTAR PERNYATAAN  
PENGALOKASIAN DANA KAMPUNG**

No.	Daftar Pernyataan	Jawabab Responden			
		SB	B	KB	TB
<b>A. Indikator Perencanaan</b>					
1.	Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BMK, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat terlibat dalam membuat perencanaan penggunaan dana kampung				

2.	kepala kampung, perangkat kampung, bmk, perwakilan tokoh agama dan masyarakat hadir dalam musyawarah yang diadakan				
3.	Adanya Rencana Kerja Kampung (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)				
4.	Adanya dengar pendapat antara aparat kampung dan masyarakat				
<b>B. Indikator Pelaksanaan</b>		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>
1.	Adanya pelaksanaan dari program yang telah dibuat				
2.	Adanya aparat Pengelola Keuangan Kampung yang ditunjuk Kepala Kampung				
3.	Pelaksanaan program dana kampung yang direncanakan				
4.	Pembangunan dilakukan sesuai aspirasi masyarakat				
<b>C. Indikator Penatausahaan</b>		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>
1.	Adanya pencatatan setiap transaksi yang dilakukan				
2.	Adanya penyertaan bukti-bukti transaksi pembelanjaan				
3.	Adanya buku kas dalam pelaporan dana kampung				
4.	Aparat melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang				
<b>D. Indikator Pelaporan</b>		<b>SB</b>	<b>B</b>	<b>KB</b>	<b>TB</b>
1.	Adanya pelaporan alokasi dana kampung				
2.	Pelaporan dilakukan secara tepat waktu				
3.	Kepala Kampung langsung melaporkan alokasi dana kampung yang digunakan				
4.	Kepala kampung langsung melaporkan kepada Bupati				

E. Pertanggungjawaban		SB	B	KB	TB
1.	Kepala Kampung dapat menjelaskan penggunaan dana kampung				
2.	Laporan dilakukan secara tertulis				
3.	Pertanggungjawaban kepala kampung terbuka dan diketahui oleh masyarakat				
4.	Semua penggunaan dana kampung disampaikan secara jujur				

Lampiran : Tabulasi data hasil penelitian

**DATA HASIL PENELITIAN  
PENGELOLAAN DANA KAMPUNG KONDENA**

No. resp.	Indikator perencanaan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2	√				√				√				√			
3	√				√				√					√		
4		√				√				√				√		
5			√			√					√					√
6	√				√					√					√	
7				√			√				√				√	
8		√			√							√				√
9				√		√						√			√	
10			√				√				√					√
11			√		√						√				√	
12				√		√						√				√
13				√		√						√				√
14				√				√				√			√	
15				√				√				√			√	
16				√			√					√			√	
17			√					√				√				√
18				√				√				√				√
19				√				√				√				√
20				√				√				√				√
Jml	4	2	4	10	6	5	3	6	3	2	4	11	2	2	7	9

No. resp.	Indikator Pelaksanaan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2	√				√				√				√			
3		√				√			√					√		
4		√				√				√				√		
5				√				√			√				√	

6				√			√			√				√		
7			√				√				√				√	
8			√					√				√		√		
9			√				√					√				√
10				√			√					√				√
11				√				√					√			√
12				√				√				√				√
13			√				√					√				√
14				√				√				√		√		√
15			√				√					√				√
16				√				√				√				√
17			√				√					√				√
18				√				√				√				√
19			√					√				√				√
20				√				√				√				√
Jml	2	2	7	9	2	2	7	9	3	2	7	8	2	4	4	10

No. resp.	Indikator penatausahaan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2		√			√				√				√			
3			√			√			√					√		
4		√				√				√				√		
5		√					√			√					√	
6			√				√					√				√
7			√					√				√				√
8				√				√				√			√	
9				√				√				√			√	
10			√					√				√			√	
11				√				√				√				√
12			√					√				√			√	
13			√					√				√				√
14				√				√				√				√
15				√				√				√				√
16			√					√				√				√
17				√				√				√			√	
18			√					√				√				√
19				√				√				√				√
20				√				√				√				√
Jml	1	3	8	8	2	2	9	7	3	2	6	9	2	2	6	10

No. resp.	Indikator pelaporan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2	√				√				√				√			
3	√					√				√				√		
4		√			√				√				√			
5	√					√			√					√		
6		√				√			√						√	
7				√				√				√			√	
8			√					√				√				√

9			√	√							√				√	
10			√				√				√			√		
11			√				√			√				√		
12				√				√			√			√		
13				√								√		√		
14				√			√					√		√		
15				√				√			√				√	
16				√			√				√				√	
17				√				√				√			√	
18				√				√				√		√		
19				√				√				√			√	
20				√								√			√	
Jml	4	2	3	11	3	3	5	9	5	4	5	6	3	2	7	8

No. resp.	Indikator Pertanggungjawaban															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2	√				√					√			√			
3		√				√			√					√		
4	√				√					√			√			
5		√				√			√					√		
6		√			√					√					√	
7			√		√						√			√		
8				√			√					√			√	
9				√		√						√				√
10			√				√				√					√
11			√					√				√			√	
12				√							√					√
13			√				√				√					√
14				√			√					√			√	
15				√				√				√				√
16			√					√				√				√
17				√			√					√				√
18				√				√			√					√
19				√				√				√				√
20				√				√				√				√
Jml	3	3	5	9	5	3	5	7	3	3	5	9	3	3	4	10

## **BIODATA**

**JULINCE KOGOYA** (24 Tahun) dilahirkan di Kampung Jinir Wunir pada tanggal 06 Mei 1997, merupakan anak dari Ayah bernama Yusup Kogoya dan Ibu Lea Wenda. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

Menamatkan pendidikan dasar di SD Inpres Makki pada tahun 2008, pendidikan menengah di SMP YPPGI Anigou Wamena pada tahun 2011 dan pendidikan menengah atas di SMA Yso Ninabua Wamena pada tahun 2014.

Melanjutkan ke Perguruan Tinggi STISIP pada tahun 2017